

**ANALISIS FRAMING PEMBERITAAN PENGHAPUSAN JURUSAN DI SMA
DALAM PROGRAM BERITA 'JAWA TENGAH HARI INI' TVRI JATENG DAN
'METRO SIANG' METRO TV (PENDEKATAN Robert N. Entman)**

Harlis Intan Saputri¹, Siti Ulfiyanti², Arisul Ulumuddin³ PBSI
Universitas PGRI Semarang¹²³

¹harlisintan6@gmail.com, ²sitiulfiyanti@upgris.ac.id, ³arisululumuddin@upgris.co.id

ABSTRACT

This research aims to understand how the two media shape their narratives using Entman's framing model, which includes problem determination, cause identification, moral judgment, and solution proposal, as well as to analyze the differences in framing between Metro TV and TVRI Central Java in reporting on the policy of eliminating majors for high school level in Indonesia. The method used is qualitative analysis of news from Metro TV's "Metro Today" and "Metro Siang" programs, as well as TVRI Central Java's "Central Java Today.". The research results show that Metro TV is more critical of this policy, highlighting the lack of government coordination, infrastructure readiness that is not yet optimal, and its impact on college entrance selection. Meanwhile, TVRI Central Java framed this policy as a positive educational reform by showing implementation in schools as well as student and teacher responses. This difference in framing shows that the media has an important role in shaping public opinion towards education policy. This research recommends that the government improve communication with educators and parents and that the media report policies in a more balanced manner so that the information received by the public is more objective.

Keywords: media framing, education policy, high school curriculum

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana kedua media membentuk narasi mereka menggunakan model framing Entman, yang mencakup penentuan masalah, identifikasi penyebab, penilaian moral, dan usulan solusi, serta untuk menganalisis perbedaan framing antara Metro TV dan TVRI Jawa Tengah dalam memberitakan kebijakan penghapusan penjurusan untuk jenjang SMA di Indonesia. Metode yang digunakan adalah analisis kualitatif terhadap berita dari program "Metro Hari Ini" dan "Metro Siang" Metro TV, serta "Jawa Tengah Hari Ini" TVRI Jawa Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Metro TV lebih kritis terhadap kebijakan ini, dengan menyoroti kurangnya koordinasi pemerintah, kesiapan infrastruktur yang belum optimal, dan dampaknya terhadap seleksi masuk perguruan tinggi. Sementara itu, TVRI Jawa Tengah membingkai kebijakan ini sebagai reformasi pendidikan yang positif dengan menampilkan implementasi di sekolah serta tanggapan siswa dan guru. Perbedaan framing ini menunjukkan bahwa media memiliki peran penting dalam membentuk opini publik terhadap kebijakan pendidikan. Penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah meningkatkan komunikasi dengan tenaga pendidik dan orang tua, serta media memberitakan kebijakan secara lebih seimbang agar informasi yang diterima masyarakat lebih objektif.

Kata Kunci: framing media, kebijakan pendidikan, kurikulum SMA

A. Pendahuluan

Kebijakan penghapusan jurusan IPA, IPS, dan Bahasa pada tingkat SMA merupakan bagian dari implementasi Kurikulum Merdeka, yang bertujuan memberikan siswa fleksibilitas dalam memilih mata pelajaran berdasarkan minat dan rencana masa depan mereka. Kebijakan ini mulai diterapkan secara nasional pada tahun ajaran 2024 sebagai respons terhadap tantangan dalam sistem pendidikan sebelumnya yang dinilai kurang adaptif dengan perkembangan zaman. Pada kurikulum 2013 yang diterapkan sebelumnya, masih menggunakan sistem penjurusan yang membatasi ruang gerak siswa dalam mengeksplorasi berbagai bidang ilmu yang sesuai dengan aspirasi karir mereka (Munawar, 2022). Dengan penghapusan jurusan ini, siswa tidak lagi dikotak-kotakkan dalam kelompok IPA, IPS, atau Bahasa, melainkan diberikan kesempatan untuk memilih mata pelajaran yang sesuai dengan bakat dan minatnya sejak dini.

Salah satu aspek utama dalam penerapan Kurikulum Merdeka adalah memberi siswa kebebasan untuk memilih mata pelajaran yang relevan dengan rencana pendidikan mereka di perguruan tinggi. Hal ini dianggap sebagai upaya meningkatkan kesesuaian antara pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, serta membekali siswa dengan keterampilan yang lebih spesifik sebelum melanjutkan ke jenjang pendidikan

selanjutnya (Muin et al., 2022). Namun, meskipun konsep ini memiliki tujuan yang baik, implementasinya menimbulkan berbagai tantangan, baik dari sisi kurikulum, kesiapan tenaga pendidik, hingga sosialisasi kepada siswa dan orang tua (Sari et al., 2023).

Di tingkat sekolah, penerapan kebijakan ini menghadapi kendala dalam hal kesiapan guru dan fasilitas pendidikan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nugraheni & Budiati (2024), sekolah-sekolah yang mengadopsi Kurikulum Merdeka mengalami kendala dalam menentukan mekanisme pemilihan mata pelajaran bagi siswa. Selain itu, banyak guru yang masih belum memiliki pemahaman yang cukup mengenai metode pengajaran dalam sistem ini, sehingga dikhawatirkan akan memengaruhi efektivitas pembelajaran di kelas. Guru memiliki peran yang sangat penting dalam sistem pendidikan dan perubahan kurikulum yang tidak diimbangi dengan pelatihan yang memadai dapat menyebabkan kebingungan dalam proses pengajaran dan evaluasi siswa (Windayanti et al., 2023).

Selain tantangan dari sisi internal sekolah, kebijakan ini juga menimbulkan dampak yang cukup signifikan terhadap proses seleksi masuk perguruan tinggi. Selama ini, sistem penerimaan mahasiswa baru di banyak perguruan tinggi masih mengacu pada jurusan IPA dan IPS. Dengan dihapusnya sistem penjurusan di SMA, mekanisme seleksi

perguruan tinggi perlu disesuaikan agar tetap relevan dengan sistem pendidikan yang baru. Menurut FatimatuZZahrah et al. (2024) tidak adanya kejelasan mengenai bagaimana perguruan tinggi akan beradaptasi dengan sistem baru ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan siswa dan orang tua. Mereka khawatir bahwa penghapusan jurusan dapat mempersulit proses pendaftaran ke perguruan tinggi yang masih menggunakan sistem seleksi berbasis jurusan.

Di sisi lain, kebijakan ini juga berdampak pada pola pembelajaran di sekolah. Dalam Kurikulum Merdeka, siswa diharapkan dapat memilih mata pelajaran yang sesuai dengan minat mereka tetapi tidak semua sekolah memiliki infrastruktur yang cukup untuk mendukung fleksibilitas tersebut. Banyak sekolah, terutama di daerah terpencil, masih mengalami keterbatasan dalam hal jumlah guru dan fasilitas laboratorium untuk mata pelajaran tertentu (Zulaiha et al., 2023). Sebagai contoh, siswa yang ingin mengambil kombinasi mata pelajaran yang berbeda dari sistem penjurusan tradisional dapat mengalami kesulitan jika sekolah mereka tidak memiliki guru yang sesuai dengan kebutuhan tersebut.

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Kristiani et al. (2023) menunjukkan bahwa tantangan terbesar dalam implementasi Kurikulum Merdeka adalah kesiapan orang tua dalam mendukung keputusan anak mereka dalam memilih mata pelajaran. Dalam sistem

penjurusan yang lama, orang tua cenderung memiliki pemahaman yang jelas mengenai perbedaan antara jurusan IPA, IPS, dan Bahasa. Namun, dengan sistem baru ini, banyak orang tua yang merasa bingung mengenai bagaimana membantu anak mereka dalam memilih mata pelajaran yang tepat. Kekhawatiran ini dapat memengaruhi proses pengambilan keputusan siswa dan menimbulkan kecemasan di kalangan keluarga.

Dari perspektif media, kebijakan penghapusan jurusan ini mendapatkan framing yang berbeda di berbagai platform berita. Berdasarkan model framing yang dikembangkan oleh Entman (1993), media memiliki peran dalam menentukan bagaimana suatu isu dipersepsikan oleh publik. Metro TV, misalnya, dalam pemberitaannya lebih menyoroti aspek kontroversial dari kebijakan ini, terutama dalam hal kurangnya koordinasi antara pemerintah dan stakeholder pendidikan. Metro TV membingkai kebijakan ini sebagai langkah yang belum sepenuhnya siap diterapkan, dengan menyoroti berbagai tantangan seperti minimnya sosialisasi, kesiapan guru, serta infrastruktur sekolah yang masih terbatas.

Di sisi lain, TVRI Jawa Tengah lebih menampilkan aspek positif dari implementasi kebijakan ini, dengan berfokus pada bagaimana sekolah-sekolah di daerah mulai menerapkan sistem ini. Dalam pemberitaan

mereka, TVRI Jawa Tengah menunjukkan bahwa penghapusan jurusan memberikan kesempatan lebih luas bagi siswa untuk mengembangkan minat mereka, dengan wawancara langsung dari guru dan siswa di SMA Negeri 2 Mranggen sebagai contoh implementasi kebijakan ini.

Media dalam mengemas suatu pemberitaan pasti memiliki sudut pandang tertentu yang pastinya berbeda antara satu berita dengan berita yang lainnya. Sudut pandang suatu berita yang berbeda ini sering disebut dengan framing. Framing sendiri merupakan teknik untuk membingkai atau menyusun informasi agar memengaruhi persepsi dan penilaian seseorang dalam melihat suatu berita tertentu. Jadi analisis framing merupakan analisis yang juga sering disebut dengan pembedaan suatu pemberitaan yang mencakup beberapa teori seperti pilihan kata, sudut pandang, dan aspek mana dari cerita yang disoroti atau diabaikan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yang digunakan oleh Robert N. Entman (1993) dan terdiri dari empat elemen utama yaitu: *define problems* (menentukan masalah), *diagnose causes* (mengidentifikasi penyebab), *make moral judgments* (memberikan penilaian moral), dan *suggest remedies* (menyarankan solusi).

Dalam analisis ini mencakup dua media besar yang juga memiliki perbedaan dalam pengemasan suatu berita serta kepemilikan

kanal televisi yang dimiliki. Metro TV merupakan stasiun televisi swasta yang bergabung dengan media grup sedangkan TVRI Jawa Tengah merupakan stasiun televisi milik pemerintah yang sudah pasti memiliki perbedaan dalam penyajian tayangan. Metro TV menyajikan tayangannya dengan mengundang narasumber dan pakar ilmu untuk membahas kasus ini sehingga berbagai kontroversi dan pandangan muncul dalam kasus ini, sedangkan dalam pemberitaan yang di tayangkan oleh TVRI Jawa Tengah juga memiliki respon positif dan juga komentar para siswa dalam menyikapi kebijakan ini.

Perbedaan framing ini menunjukkan bagaimana media dapat membentuk persepsi publik terhadap kebijakan pendidikan. Dalam konteks strategic communication research, framing digunakan sebagai alat untuk membentuk interpretasi publik terhadap suatu isu berdasarkan sudut pandang tertentu (Völker, 2024). Dalam penelitian ini, analisis framing akan digunakan untuk memahami bagaimana perbedaan sudut pandang Metro TV dan TVRI Jawa Tengah dalam menyampaikan berita terkait penghapusan jurusan di SMA.

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Metro TV dan TVRI Jawa Tengah membingkai kebijakan penghapusan jurusan di SMA dalam pemberitaan mereka. Dengan menggunakan model framing dari Entman, penelitian ini

akan mengidentifikasi pola pemberitaan dari kedua media, serta mengeksplorasi bagaimana perbedaan framing ini dapat memengaruhi pemahaman masyarakat terhadap kebijakan ini. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pemerintah dalam mengelola komunikasi kebijakan agar lebih efektif dalam menyampaikan informasi kepada publik.

Dari hasil analisis ini, diharapkan bahwa penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam memahami peran media dalam membentuk opini publik terhadap kebijakan pendidikan. Dengan memahami bagaimana media membingkai isu ini, pemangku kebijakan dapat mengambil langkah-langkah yang lebih baik dalam menyusun strategi komunikasi yang lebih efektif untuk mendukung implementasi kebijakan pendidikan yang lebih baik di masa depan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis framing dengan model yang dikembangkan oleh Robert N. Entman (1993), yang terdiri dari empat elemen utama: *define problems (menentukan masalah)*, *diagnose causes (mengidentifikasi penyebab)*, *make moral judgments (memberikan penilaian moral)*, dan *suggest remedies (menyarankan solusi)*. Model ini digunakan untuk memahami bagaimana media membingkai suatu isu dengan menyoroti aspek tertentu dalam

pemberitaan. Dengan menggunakan model ini, penelitian ini akan mengidentifikasi bagaimana Metro TV dan TVRI Jawa Tengah membentuk narasi mengenai kebijakan penghapusan jurusan di SMA dalam pemberitaan mereka. Framing yang digunakan oleh kedua media akan dianalisis untuk melihat perbedaan dalam menentukan permasalahan, penyebab, evaluasi moral, dan solusi yang disajikan dalam berita.

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari video berita yang tayang di kanal YouTube Metro TV dan TVRI Jawa Tengah, serta proses pengumpulan data dilakukan pada kurun waktu tertentu saat penayangan kedua berita tersebut. Metro TV dan TVRI Jawa Tengah memiliki perbedaan waktu saat penayangan kedua berita ini, Metro TV pada program berita “Metro Hari Ini” dan “Metro Siang” tayang pada Jumat, 19 Juli 2024 sedangkan TVRI Jawa Tengah pada program berita “Jawa Tengah Hari Ini” tayang pada Kamis, 25 Juli 2024. Metro TV menyajikan dua program berita yang berkaitan dengan topik ini, yaitu “Metro Hari Ini”, yang lebih menyoroti aspek kontroversial serta kesiapan kebijakan, dan “Metro Siang”, yang menyoroti urgensi perubahan serta tantangan dalam implementasi kebijakan ini. Sementara itu, TVRI Jawa Tengah melalui program “Jawa Tengah Hari Ini” menampilkan penerapan langsung kebijakan di SMA Negeri 2 Mranggen, Demak, dengan wawancara dari

pihak sekolah serta tanggapan siswa terhadap kebijakan ini. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini mencakup pengkategorian elemen framing dalam pemberitaan masing-masing media serta perbandingan pendekatan yang digunakan Metro TV dan TVRI Jawa Tengah dalam membingkai isu penghapusan jurusan di SMA.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

a. Hasil Penelitian

1. Framing Pemberitaan Metro TV

a. *Define Problems* (Menentukan Masalah)

Dalam pemberitaan Metro TV, kebijakan penghapusan jurusan di SMA dibingkai sebagai masalah yang belum siap diimplementasikan, dengan berbagai kendala teknis dan administratif. Dalam program “Metro Hari Ini”, kebijakan ini dianggap sebagai langkah yang dilakukan tanpa koordinasi yang matang antara pemerintah dan stakeholder pendidikan, yang berujung pada minimnya sosialisasi terhadap sekolah, guru, siswa, dan orang tua. Sementara itu, dalam Metro Siang, Metro TV menyoroti bagaimana perubahan sistem pendidikan ini dapat mempengaruhi sistem seleksi masuk perguruan tinggi, yang masih berbasis pada penjurusan IPA, IPS, dan Bahasa (Muin et al., 2022).

b. *Diagnose Causes* (Menentukan Penyebab)

Metro TV mengidentifikasi kurangnya koordinasi pemerintah sebagai penyebab utama permasalahan dalam implementasi kebijakan ini. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) dianggap belum memberikan sosialisasi yang cukup kepada sekolah dan guru, sehingga banyak pihak yang masih bingung mengenai bagaimana sistem baru ini akan diterapkan. Selain itu, Metro TV juga menyoroti ketidaksiapan infrastruktur sekolah, terutama dalam hal jumlah tenaga pengajar yang dapat mengakomodasi sistem pemilihan mata pelajaran yang lebih fleksibel (FatimatuZZahrah et al., 2024).

c. *Make Moral Judgments* (Memberikan Penilaian Moral)

Pemberitaan Metro TV memberikan penilaian negatif terhadap kebijakan ini, dengan menekankan bahwa perubahan sistem pendidikan seharusnya dilakukan secara bertahap dan dengan persiapan yang lebih baik. Dalam beberapa wawancara yang ditampilkan, banyak guru dan orang tua yang merasa khawatir terhadap dampak kebijakan ini, terutama bagi siswa yang masih kesulitan dalam menentukan jalur pendidikan mereka tanpa adanya sistem penjurusan yang jelas (Sari et al., 2023).

d. *Suggest Remedies*

(Menyarankan Solusi)

Metro TV menyarankan bahwa pemerintah perlu memperkuat sosialisasi dan

pelatihan bagi guru, agar mereka dapat membimbing siswa dalam memilih mata pelajaran yang sesuai. Selain itu, perlu ada penyesuaian dalam sistem seleksi perguruan tinggi, agar kebijakan ini tidak menjadi penghambat bagi siswa yang ingin melanjutkan pendidikan mereka di universitas yang masih menggunakan sistem penjurusan lama (Nugraheni & Budiati, 2024).

2. Framing Pemberitaan TVRI Jawa Tengah

a. *Define Problems* (Menentukan Masalah)

Berbeda dengan Metro TV, TVRI Jawa Tengah membingkai kebijakan penghapusan jurusan di SMA sebagai langkah positif dalam reformasi pendidikan, yang memberikan lebih banyak fleksibilitas bagi siswa dalam memilih jalur pendidikan mereka. Dalam program “Jawa Tengah Hari Ini”, TVRI Jawa Tengah menampilkan bagaimana kebijakan ini telah mulai diterapkan di SMA Negeri 2 Mranggen, Demak, dengan wawancara dari guru dan siswa yang menyambut baik perubahan ini (Kristiani et al., 2023).

b. *Diagnose Causes* (Menentukan Penyebab)

TVRI Jawa Tengah mengidentifikasi bahwa sistem pendidikan yang terlalu kaku dengan sistem penjurusan lama sebagai penyebab perlunya perubahan ini. Dalam wawancara dengan guru dan kepala sekolah,

dijelaskan bahwa sistem penjurusan sebelumnya membatasi ruang gerak siswa untuk mengeksplorasi berbagai bidang ilmu yang sesuai dengan minat mereka. Dengan sistem baru ini, siswa dapat memilih mata pelajaran yang lebih relevan dengan rencana masa depan mereka, tanpa harus terikat dalam kelompok IPA, IPS, atau Bahasa (Zulaiha et al., 2023).

c. *Make Moral Judgments* (Memberikan Penilaian Moral)

Framing dalam pemberitaan TVRI Jawa Tengah memberikan penilaian positif terhadap kebijakan ini, dengan menampilkan bagaimana siswa dan guru menyesuaikan diri dengan sistem baru ini. Guru tetap memiliki peran dalam membimbing siswa, sehingga kebijakan ini tidak menyebabkan kebingungan, melainkan justru memberikan lebih banyak kesempatan bagi siswa untuk berkembang sesuai dengan potensi mereka (Yasmansyah, 2022).

d. *Suggest Remedies* (Menyarankan Solusi)

Meskipun lebih positif, TVRI Jawa Tengah tetap menyarankan bahwa pendampingan yang lebih intensif dari guru dan sekolah diperlukan, agar siswa tidak merasa bingung dalam memilih mata pelajaran. Selain itu, TVRI Jawa Tengah menekankan pentingnya peran orang tua dalam mendukung anak-anak mereka, agar mereka dapat membuat keputusan akademik

yang tepat sesuai dengan minat dan bakat mereka (Frastika, 2022).

3. Perbandingan Framing Metro TV dan TVRI Jawa Tengah

Table 1. Perbandingan Framing

Aspek Framing	Metro TV	TVRI JATENG
<i>Define</i>	Menyoroti	Membingkai
<i>Problems</i> (Menentukan Masalah)	ketidaksiapan pemerintah dalam implementasi kebijakan dan potensi dampak negative terhadap sistem seleksi masuk perguruan tinggi.	kebijakan ini sebagai langkah positif dalam reformasi pendidikan yang bertujuan memberikan lebih banyak fleksibilitas bagi siswa dalam memilih jalur pendidikan mereka.
<i>Diagnose Causes</i> (Menentukan Penyebab)	Mengidentifikasi kurangnya koordinasi pemerintah dan kesiapan infrastruktur sekolah sebagai penyebab utama permasalahan dalam implementasi kebijakan	Mengidentifikasi sistem penjurusan lama yang dianggap terlalu kaku sebagai alasan utama perlunya reformasi dalam sistem pendidikan.
<i>Make Moral Judgements</i> (Memberikan Penilaian Moral)	Memberikan penilaian negatif terhadap kebijakan ini, dengan menekankan	Memberikan penilaian positif terhadap kebijakan ini, dengan menampilkan

berbagai tantangan yang muncul akibat kurangnya persiapan dalam implementasi kebijakan. pengalaman langsung guru dan siswa dalam menyesuaikan diri dengan sistem baru ini.

<i>Suggest Remedies</i> (Menyarankan Solusi)	Menyarankan agar pemerintah meningkatkan sosialisasi dan pelatihan bagi guru, serta menyesuaikan sistem seleksi masuk perguruan tinggi agar kebijakan ini dapat berjalan dengan baik.	Menyarankan bahwa pendampingan dari guru dan peran aktif orang tua sangat diperlukan, agar siswa dapat membuat keputusan akademik yang lebih tepat.
---	---	---

b. Pembahasan

1. Perbedaan Framing Metro TV dan TVRI Jawa Tengah

Media memiliki peran besar dalam membentuk opini publik terhadap kebijakan pendidikan, terutama dalam kebijakan yang bersifat kontroversial seperti penghapusan jurusan di SMA. Metro TV dan TVRI Jawa Tengah sebagai dua media berbeda memiliki pendekatan yang kontras dalam membingkai isu ini. Metro TV dalam program “Metro Hari Ini” dan “Metro Siang” menyoroti aspek kontroversial dari kebijakan tersebut, dengan menekankan kurangnya kesiapan pemerintah dalam implementasi. Metro TV menampilkan perspektif yang lebih kritis

terhadap kebijakan ini dengan menyoroti kurangnya koordinasi antara pemerintah dan stakeholder pendidikan, serta menyatakan bahwa penghapusan jurusan menimbulkan ketidakpastian dalam sistem seleksi perguruan tinggi. Hal ini sejalan dengan temuan Muin et al. (2022) yang menyebutkan bahwa reformasi pendidikan yang dilakukan tanpa perencanaan matang dapat menimbulkan resistensi dari berbagai pihak yang terdampak.

Dalam pemberitaannya, Metro TV juga menyoroti kurangnya kesiapan infrastruktur sekolah dalam mendukung implementasi Kurikulum Merdeka, terutama dalam hal ketersediaan guru yang dapat mengajar lintas bidang. Penelitian Fatimatuzzahrah et al. (2024) menemukan bahwa salah satu tantangan utama dalam implementasi kurikulum baru adalah ketidaksiapan tenaga pendidik dalam menyesuaikan metode pembelajaran mereka dengan sistem yang lebih fleksibel. Banyak guru yang belum mendapatkan pelatihan memadai dalam mendampingi siswa dalam memilih mata pelajaran sesuai dengan minat dan kemampuan akademiknya. Selain itu, Barlian & Solekah (2022) menyatakan bahwa sistem pendidikan yang tidak disertai dengan persiapan infrastruktur yang memadai dapat berujung pada kesenjangan pendidikan, terutama bagi sekolah-sekolah di daerah terpencil yang

memiliki keterbatasan fasilitas dan tenaga pengajar.

Sebaliknya, framing yang digunakan oleh TVRI Jawa Tengah dalam program “Jawa Tengah Hari Ini” lebih menekankan implementasi langsung kebijakan di sekolah dan dampak positifnya bagi siswa dan guru. Dalam pemberitaan ini, TVRI Jawa Tengah berusaha menampilkan bagaimana kebijakan ini diterapkan di SMA Negeri 2 Mranggen, Demak, dan bagaimana siswa serta guru menanggapi perubahan ini. Alih-alih menyoroti kontroversi, TVRI Jawa Tengah lebih banyak menampilkan perspektif siswa dan guru, yang sebagian besar menyatakan bahwa mereka merasa lebih fleksibel dalam memilih mata pelajaran yang sesuai dengan minat mereka. Temuan serupa juga dijelaskan oleh Kristiani et al. (2023) yang meneliti transisi dari Kurikulum 2013 ke Kurikulum Merdeka dan menemukan bahwa kebebasan dalam memilih mata pelajaran dapat meningkatkan motivasi belajar siswa jika diberikan bimbingan yang tepat.

Pemberitaan TVRI Jawa Tengah juga menunjukkan bahwa dalam implementasi kebijakan ini, guru tetap memiliki peran dalam membimbing siswa, sehingga meskipun siswa memiliki kebebasan dalam memilih mata pelajaran, mereka tetap mendapatkan rekomendasi berdasarkan nilai akademik dan minat mereka. Zulaiha et al. (2023) menemukan bahwa dalam sistem

pendidikan yang lebih fleksibel, peran guru bergeser dari sekadar pengajar menjadi fasilitator yang membimbing siswa dalam menentukan jalur pendidikan mereka. Dengan demikian, framing yang digunakan oleh TVRI Jawa Tengah lebih menonjolkan aspek positif dari kebijakan ini, dibandingkan dengan Metro TV yang lebih menyoroti tantangan dan potensi dampak negatifnya.

2. Dampak Perbedaan Framing terhadap Persepsi Publik

Perbedaan framing dalam pemberitaan Metro TV dan TVRI Jawa Tengah mencerminkan bagaimana media dapat mempengaruhi opini publik terhadap kebijakan pendidikan yang sedang diterapkan. Metro TV, dengan pendekatannya yang lebih kritis, berpotensi meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap tantangan implementasi kebijakan, terutama dalam hal kesiapan infrastruktur, sosialisasi kepada tenaga pendidik dan siswa, serta dampaknya terhadap sistem seleksi perguruan tinggi. Sari et al. (2023) menyatakan bahwa perubahan kurikulum yang tidak disertai dengan komunikasi yang jelas dari pemerintah dapat menyebabkan kebingungan di kalangan siswa dan orang tua, yang pada akhirnya dapat menurunkan efektivitas kebijakan yang diterapkan.

Di sisi lain, framing yang digunakan

oleh TVRI Jawa Tengah, yang lebih menampilkan pengalaman siswa dan guru dalam menerapkan kebijakan ini, dapat membantu mengurangi resistensi masyarakat terhadap perubahan sistem pendidikan. Dengan menampilkan aspek positif dari kejadian ini, TVRI Jawa Tengah dapat membangun narasi bahwa penghapusan jurusan di SMA sebenarnya memberikan lebih banyak manfaat bagi siswa, seperti kebebasan dalam memilih mata pelajaran yang lebih relevan dengan rencana studi mereka di perguruan tinggi. Penelitian yang dilakukan oleh Nugraheni & Budiati (2024) menunjukkan bahwa pemberitaan media yang menyoroti implementasi kebijakan secara langsung di sekolah cenderung lebih efektif dalam meningkatkan penerimaan publik terhadap kebijakan tersebut dibandingkan dengan media yang lebih focus pada kritik dan kontroversi.

3. Implikasi Framing Media terhadap Implementasi Kebijakan

Perbedaan framing dalam pemberitaan Metro TV dan TVRI Jawa Tengah juga memiliki dampak terhadap implementasi kebijakan di berbagai tingkatan, mulai dari pemerintah, sekolah, hingga siswa dan orang tua.

Pemerintah harus lebih aktif dalam mensosialisasikan kebijakan ini kepada seluruh pemangku kepentingan, agar tidak

terjadi kesalahpahaman di masyarakat. Bungawati (2022) menyatakan bahwa komunikasi yang buruk dalam penerapan kebijakan pendidikan dapat menyebabkan resistensi dari berbagai pihak dan menghambat implementasi kebijakan di lapangan. Oleh karena itu, pemerintah harus memastikan bahwa sebelum kebijakan diterapkan secara menyeluruh, guru dan tenaga pendidik telah mendapatkan pelatihan yang cukup, serta infrastruktur yang diperlukan sudah tersedia.

Dari perspektif sekolah dan guru, kebijakan ini memberikan tantangan baru dalam sistem pembelajaran. Nurhasanah et al. (2022) menekankan bahwa dalam sistem yang lebih fleksibel, guru harus mampu memberikan bimbingan yang lebih personal kepada setiap siswa, agar mereka tidak salah dalam memilih mata pelajaran yang akan mereka ambil.

Bagi siswa dan orang tua, kebijakan ini memberikan lebih banyak kebebasan dalam memilih mata pelajaran, tetapi juga menimbulkan tanggung jawab yang lebih besar dalam menentukan jalur pendidikan mereka. Adla & Maulia (2023) menyebutkan bahwa kebijakan yang memberikan siswa lebih banyak kebebasan dalam memilih mata pelajaran dapat meningkatkan rasa tanggung jawab mereka dalam belajar, tetapi tanpa bimbingan yang cukup, siswa dapat mengalami kebingungan dalam menentukan

pilihan yang tepat. Oleh karena itu, orang tua perlu diberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kebijakan ini, agar mereka dapat mendukung anak-anak mereka dalam memilih mata pelajaran yang sesuai dengan minat dan potensi akademiknya.

E. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa Metro TV dan TVRI Jawa Tengah memiliki sudut pandang yang berbeda dalam membahas kebijakan penghapusan jurusan di SMA. Metro TV lebih menyoroti tantangan dan kritik terhadap kebijakan ini, dengan menekankan kurangnya koordinasi pemerintah, kesiapan infrastruktur yang belum optimal, serta dampak terhadap sistem seleksi masuk perguruan tinggi. Sebaliknya, TVRI Jawa Tengah lebih fokus pada implementasi di sekolah dan bagaimana siswa serta guru menyesuaikan diri dengan sistem baru ini. Perbedaan framing ini menunjukkan bahwa media memiliki peran besar dalam membentuk opini publik terhadap kebijakan pendidikan. Oleh karena itu, pemerintah perlu meningkatkan komunikasi dan sosialisasi agar kebijakan ini lebih dipahami oleh semua pihak, terutama guru dan orang tua. Media juga perlu lebih berimbang dalam pemberitaannya, agar masyarakat mendapatkan informasi yang lebih objektif. Penelitian lebih lanjut dapat dilakukan dengan menganalisis pemberitaan

dari media lain atau melalui wawancara dengan guru dan siswa.

DAFTAR PUSTAKA

- Adla, S. R., & Maulia, S. T. (2023). Transisi kurikulum K13 dengan kurikulum merdeka terhadap hasil belajar siswa. *Lencana: Jurnal Inovasi Ilmu Pendidikan*, 1(2), 262–270.
- Barlian, U. C., & Solekah, S. (2022). Implementasi kurikulum merdeka dalam meningkatkan mutu pendidikan. *JOEL: Journal of Educational and Language Research*, 1(12), 2105–2118.
- Bungawati, B. (2022). Peluang dan tantangan kurikulum merdeka belajar menuju era society 5.0. *Jurnal Pendidikan*, 31(3), 381–388.
- Entman, R. M. (1993). Framing: Toward clarification of a fractured paradigm. *Journal of Communication*, 43(4), 51–58.
- Fatimatuzzahrah, F., Sakinah, L., & Alyasari, S. A. (2024). Problematika Implementasi Kurikulum Merdeka Di Sekolah: Tantangan Membangun Kualitas Pendidikan. *Jurnal Bintang Pendidikan Indonesia*, 2(1), 43–53.
- Frastika, A. F. (2022). Problematika implementasi kurikulum dan pembelajaran pendidikan karakter di indonesia. *Journal Educational of Indonesia Language*, 3(2), 18–26.
- Kristiani, E., Andrianti, P., Enjelie, E., Norjanah, N., & Bulandari, B. (2023). Komparatif epistemologi-aksiologis kurikulum k13 dengan kurikulum merdeka. *Jurnal Pengajaran Sekolah Dasar*, 2(1), 76–92.
- Muin, A., Fakhruddin, A., Makruf, A. D., & Gandi, S. (2022). *Pengembangan Kurikulum Merdeka*.
- Munawar, M. (2022). Merdeka Belajar. *Jurnal Pedagogy*, 15(2), 137–149.
- Nugraheni, I., & Budiati, A. C. (2024). Analisis Strategi Sekolah dalam Melaksanakan Kebijakan Penghapusan Penjurusan di SMA Negeri 3 Surakarta. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 9(3), 412–425.
- Nurhasanah, A., Simbolon, M. E., & Syafari, R. (2022). Fasilitasi pengembangan perangkat ajar menuju kurikulum merdeka. *Jumat Pendidikan: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(3), 147–150.
- Sari, P., Bulantika, S. Z., Smith, M. Bin, & Korompot, S. (2023). Pemahaman Guru Bk Terhadap Penghapusan Jurusan Di Jenjang SMA Pada Kurikulum Merdeka. *Superior Education Journal*, 1(1), 18–23.
- Völker, D. (2024). Entman (1993): Framing. In *Schlüsselwerke für die Strategische Kommunikationsforschung* (pp. 353–364). Springer.
- Windayanti, W., Afnanda, M., Agustina, R., Kase, E. B. S., Safar, M., & Mokodenseho, S. (2023). Problematika guru dalam menerapkan kurikulum merdeka. *Journal on Education*, 6(1), 2056–2063.
- Yasmansyah, Y. (2022). Konsep merdeka belajar kurikulum merdeka. *Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan Indonesia*, 1(1), 29–34.
- Zulaiha, S., Meisin, M., & Meldina, T. (2023). Problematika guru dalam menerapkan kurikulum merdeka belajar. *Terampil: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Dasar*, 9(2), 163–177.